

**TINJAUAN HUKUM ISLAM STUDI IMPLEMENTASI
PELAKSANAAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL 2018)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD SYUKRON ALAN NASRULLOH
12350080

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF AL-MAQASHID ASY-SYARI'AH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018)

Skripsi ini mengkaji masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah, yakni ditinjau dari perspektif maqosid syari'ah. Hal ini dilatar belakangi oleh meningkatnya pernikahan wanita hamil diluar nikah yang disebabkan karena pergaulan bebas. KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul juga harus menghadapi realitas wanita hamil yang ingin mengesahkan pernikahannya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan wanita hamil diluar nikah perspektif Maqoshid Syari'ah di KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Studi ini dikaji dengan metode pendekatan deskriptif analisis serta deskripsi normatif, yaitu menganalisis pandangan penghulu di KUA Kecamatan Banguntapan Bantul terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah dan pandangan hukum islam terhadap nikah hamil di KUA Banguntapan Kabupaten Bantul. Datanya diperoleh melalui obsevasi formil dan wawancara terstruktur dan terbuka dengan penghulu yang berperan penting dalam prosedur perkawinan di KUA Kecamatan Banguntapan Bantul. Hasil wawancara ini dibandingkan dengan Pandangan Hukum Islam terhadap nikah hamil berdasarkan perspektif maqoshid syari'ah

Adapun hasil penelitian ini adalah Pandangan Penghulu di KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil adalah diperbolehkan dengan syarat pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum dan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pandangan tersebut menyandarkan argumentasi pada Undang-Undag No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, yaitu seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dan pada saat wanita hamil , tidak diperlukan perkawinan ulang setela anak yang dikandungnya lahir. Jika dinikahkan dengan pria yang bukan menghamilinya maka tidak sah dan tidak diperbolehkan.

Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah hamil adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku , yakni Pasal 53 KHI dan tidak bertentangan dengan kandungan surah An-Nur (24) Ayat (3). Wanita hamil akibat zina boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya demi kemaslahatan, yaitu menjaga aib Keluarga, agar anak yang dikandungnya memiliki nasab yang jelas. Apabila wanita hamil aibat zina akan dinikahkan dengan pria yang bukan menghamili, maka PPN KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul akan menimbang-nimbang kembali, dan tindakan yang tepat adalah tidak menikahkan wanita hamil tersebut sambil menunggu kelahiran sang bayi lahir, dan mengacu pada aturan KHI dan agar supaya tidak terjadi percampuran nasab yang tidak diinginkan.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syukron Alan Nashrulloh

NIM : 12350080

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH" (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL 2018)**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya.



Yogyakarta, 19 Dzulqaidah 1440 H
19 Juli 2019 M

Saya yang menyatakan,

Muhammad Syukron Alan Nashrulloh

NIM: 12350080



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Syukron Alan Nashrulloh

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syukron Alan Nashrulloh

NIM : 12350080

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF AL-MAQOSHID ASY-SYARI'AH "(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 - 2019)"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb .

Yogyakarta, 6 Dzul'Qaidah 1440 H

6 July 2019

Pembimbing,

Dr.H. Malik Ibrahim, M. Ag

NIP: 1966 0801 1993 031 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-448/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH (STUDI
KASUS DI KUA KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN
2018)

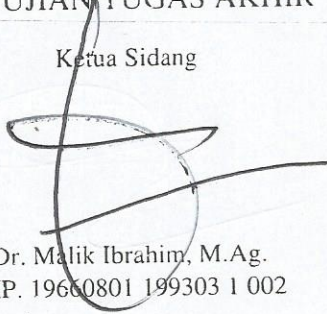
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SYUKRON ALAN NASRULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12350080
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

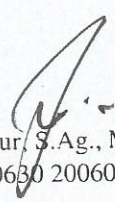
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

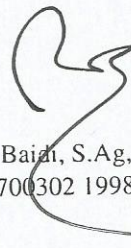
Ketua Sidang


Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

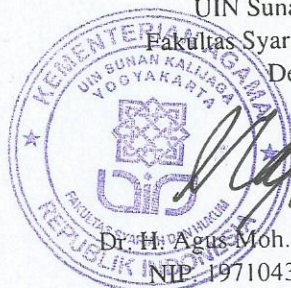

Yasin Baiha, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 26 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

واتوا النساء صدقاتهن نحلة فاعن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

“Dan Berikanlah maskawin (Mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (Maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

(Q.S An-Nisa (4))

KATA PERSEMBAHAN

Karya ini Aku Persembahkan Kepada:

- Kedua Orangtua Ku, Ayahanda Bapak. H. Hasan Zubaidi,
- Ibunda Tri Almuti'ah Yang Aku Sayangi dan Aku Kasihi Yang Selalu memberikanku motivasi, serta kasih sayang dan mendo'akan agar aku kelak menjadi orang yang sukses. Hingga aku Tumbuh dan berkembang menjadi orang besar. Kakak – Kakakku Yang Aku Sayangi: Sdr. Fatah Samodra Alhayat, Sdr. Yahya Muammar Tamami, Tawakkal Akbar Darojat, kemudian Kakak perempuanku Sdri. Mutiarra Kusumawati. Yang Selalu Menyemangatiku dan memberiku motivasi agar tumbuh menjadi Pemotivator handal dan bergelar Sarjanawan.
- Dan Untuk Almamateku Tercinta Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

.....GOOD LUCK.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

V. Voral Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā tansā</i>
Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ī karīm</i>
Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَوْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	'u'iddat
لَنْهَشْكُرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القيش	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السمبء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمص	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negerayang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل و سلم علي محمد و علي اله و اصحابه اجمعين ام بعد

Segala puji dan syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan – Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan benar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia hingga akhir hayat. Dalam penyelesaian skripsi ini TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF AL-MAQASHID ASY-SYARI'AH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018).

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyusun. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran dan do'a semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S-1 program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas

terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A.,PhD., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaa Yogyakarta
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syai'ah & Hukum Sunan Kalijaga beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staff-staffnya.
3. Bapak. Mansur, S.Ag.,M.Ag., Selaku Ketua Prodi Hukum keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag dan Bapak Ahmad Fikri, S.Ag., M.M., selaku Sekretaris dan Staff TU Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Dr.H.Malik Ibrahim.,M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan hingga terselesaikannya tugas akhir skripsi yang kami persembahkan.
6. Bapak. Ahmad Patiroy, S, Ag., M. Ag., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dalam perkuliahan selama ini.
7. Teruntuk Ayahanda Drs. H. Hasan Zubaidi dan Ibunda Hj. Tri Almuti'ah, S.H serta, Kakak-Kakakku, Sdr. Fattah Samodra Alhayat, M.M Sdr. Yahya Mua'mmat T, S.Hi, Sdr. Tawakkal Akbar Darajat, S, Hi , Sdri. Mutiarra Kusumawati, S. Si.,M. Pd. Yang tak kenal lelah dengan segala

dukungannya baik berupa materi, moril, dan untaian-untaian do'a yang selalu dipanjatkan hingga mengantarkan ananda sampai pada tahap ini.

8. Bapak. H. Wiharno., S.Ag, Selaku Kepala KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta berperan penting dalam penelitian yang kami susun hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Bapak. Choirul Amin, S.Ag., MS,i., Bpk. Warsana Muji Raharjo, S.Ag, dan Agung Ismaryanto,S.Ag., selaku penghulu dan juga seluruh Staff KUA Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta, yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyelesaian hingga terselesaikannya skripsi yang kami persembahkan.
10. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Asy Syakhsiyyah) angkatan 2012-2013 Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Trimakasih kepada sahabatku Abdul Ghofur, S.H. dan Muhammad Rofiq Firdaus, S.H. yang telah membatu, memberi masukan, membimbing dan memotivasi selama studi maupun selama penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh Temen-temen penyusun yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, semoga kita semua dapat menjadi sosok hamba yang telah diharapkan dan sukses di dunia dan di akhirat.
13. Seluruh Pihak di Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah membantu hingga terselesaikannya karya ilmiah yang penyusun persembahkan.

Semoga semua kebaikan dan ketulusan semua pihak berbuah amal ibadah kelak dapat mendapat ridho Allah Swt. Amin. Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah skripsi ini masih dapat kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dibutuhkan guna perbaikan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Kita kembalikan semua urusan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai amal Ibadah disisi-Nya. Amin....

Yogyakarta, Dzulhijah 1440 H
6 Juli 2019

Penyusun,

Muhammad Syukron Alan Nashrullah
NIM: 12350080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL, DESPENSASI KAWIN SERTA KONSEP MAQASHID SYARI'AT	
A. Konsep Perkawinan.....	32
1. Pengertian dan Hukum Melakukan Perkawinan	32
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	37
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	41
B. Gambaran Umum Tentang Pelaksanaan Perkawinan Hamil Diluar Nikah.....	45
1. Pengertian Kawin Hamil	45
2. Kedudukan Hukum Kawin Hamil.....	46

3. Akibat dari Perkawinan Hamil Diluar Nikah.....	50
C. Gambaran Umum Tentang Dispensasi Kawin	53
1. Pengertian Dispensasi Kawin	53
2. Dispensasi Kawin Dalam Hukum Islam	55
D. Dispensasi Kawin Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	60
E. Gambaran Umum Tentang Konsep <i>Maqashid Syari'ah</i>	64
1. Pengertian " <i>Maqashid Syari'ah</i> "	64
2. Dasar Hukum " <i>Maqashid Syari'ah</i> "	68
3. Urgensi <i>Maqashid Syari'ah</i> dalam Sebuah Hukum	71
4. Klasifikasi <i>Maqashid Syari'ah</i>	76
 BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN NIKAH HAMIL DI KUA KECAMATAN BANGUNTAPAN BANTUL	
A. Deskripsi Umum KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul	92
1. Kondisi Kantor	92
2. Struktur KUA	93
3. Visi dan Misi	95
B. Pelaksanaan Nikah Hamil di KUA Kecamatan Banguntapan Bantul	96
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL DI KUA KECAMATAN BAGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL	
A. Pandangan Penghulu Terhadap Nikah Hamil di KUA Kecamatan Banguntapan Bantul	104
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil di KUA Kecamatan Banguntapan Bantul	106
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran-Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu manusia selalu membutuhkan orang lain, begitu pula dalam konteks hubungan antara pria dan wanita. Kedua jenis manusia ini akan saling membutuhkan untuk mempertahankan garis keturunannya. Adapun secara moral caranya yaitu dengan melakukan ikatan perkawinan sesuai hukum. Perkawinan atau nikah merupakan akad yang mengandung pembolehan bersenang senang (*istimta*) dengan seorang wanita melalui jimak bersentuhan, bercituman, berpelukan, dan lain-lain.¹

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara vertikal maupun horizontal, dimantara secara vertikal diatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal diatur bagaimantara manusia agar mampu berinteraksi sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan.

Allah swt menciptakan manusia berjenis kelamin (sex) laki-laki dan perempuan, sehingga mereka menjadi berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan, yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Allah yang umurm dan berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

¹ Musthafa luthfi, *Nikah Sirri*, (Jarakarta: Wacantara Imiah Press, 2010), hlm.5.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

رسلا مبشرين و منذرين لنلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل²

Islam di dalam memberikan anjuran menikah terdapat beberapa motivasi yang jelas, tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab, menikah merupakan bagian dari nikmat seta tanda keagungan Allah yang diberikan kepada ummat manusia. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan agama Allah di persada bumi pertiwi ini.³

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi, ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi menegaskan sebagai akad yang sangat kuat seperti yang telah diatur dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :⁴

ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب لعلكم تتقون⁵

² Q.S An-Nisa (4) : 165.

³ Ahmad Mudjab Maali, *Wahai Pemuda Menikahlah*, cet 1 (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm 43.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 53 ayatt (2), (Bandung: Humaniora Utama Press), 1991.

⁵ Q.S Al-Baqarah (2): 179.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶ Pada mulanya syariah Islam baik dalam al-Qur’an atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan pernikahan. Namun, dengan adanya tuntutan perkembangan dan sebagai pertimbangan kemashlahatan, Hukum Islam di Indonesia mengatur tentang pencatatan pernikahan.⁷ Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan yang lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Di Negara Indonesia, suatu pernikahan yang dilaksanakan haruslah dicatatkan di pencatatan sipil bagi yang beragama selain Islam, sedangkan untuk calon mempelai yang beragama Islam dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai pernikahan di bawah tangan, yang mantara hal ini akan berdampak terhadap pencatatan akta kelahiran anak hasil pernikahan tersebut di kemudian hari. Dari sinilah, seyogyanya bagi kalangan yang akan melangsungkan pernikahan, mereka melakukan hubungan dengan KUA sebagai petugas pencatat pernikahan.⁸

Memperhatikan ketentuan-ketantuan hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.114

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 107

⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid Ke-4, hlm 1335.

administratif. Artinya pernikahan tetap sah, karena standar sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. Pencatatan pernikahan diatur karena tanpa pencatatan, suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari pernikahan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan pernikahan itu sendiri.⁹ Pada dasarnya, suatu pernikahan sudah sah apabila telah memenuhi rukun, yaitu :¹⁰

1. Adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Adanya sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul¹¹

Idealnya pernikahan dilangsungkan dengan niat yang baik demi menjalankan sunah Rasul. Akan tetapi, pada kenyatannya terkadang perkawinan dilangsungkan demi tanggung-jawab sosial akibat wanita telah terlanjur hamil. Kondisi ini menjadi salah satu problem yang harus dihadapi Kantor Urusan Agama, mengingat semakin tingginya kasus pernikahan akibat wanita yang hamil. Kasus tersebut diantaranya terjadi pada remaja yang melakukan seks pra nikah. Sebagai gambaran, angka kehamilan di luar nikah pada tahun 2015

⁹ *Ibid.*, h. 110

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 46-47

¹¹ *Ibid.*, hlm. 210

merata di lima kabupaten/kota di Yogyakarta. Angka kehamilan di luar nikah di Bantul ada 276 kasus, Kota Yogyakarta ada 228 kasus, Sleman ada 219 kasus, Gunungkidul ada 148 kasus, dan Kulon Progo ada 105 kasus. Angka ini berbanding lurus dengan data dispensasi nikah usia 16-18 tahun di Pengadilan Agama yang cukup tinggi mencapai 37 selama 2015.¹²

Masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaan labil. Selain itu, ketentuan di atas juga sulit dilakukan mengingat cara untuk memastikan bahwa yang menikahi wanita hamil di luar nikah tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya.¹³

Dalam hal ini, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana terdapat dalam KHI Pasal 53 ayat 1, yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

¹² Kresna, 2016, *Dalam setahun, 976 pelajar Yogyakarta hamil di luar nikah*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-setahun-976-pelajar-yogyakarta-hamil-di-luar-nikah.html> pada tanggal 30 Agustus 2018.

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munaqahat* (Jakarta: Kencantara Prenada Grup, 2003), hlm. 13

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁴

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa wanita yang hamil di luar nikah hanya dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan tersebut merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh KUA sebagai pegawai pencatat nikah.¹⁵

Hukum perkawinan bermacam-macam tergantung dari sistem hukum yang digunakan. Perkawinan di Indonesia harus mengacu pada ketentuan hukum agama masing-masing menurut apa yang dianutnya. Perkawinan dilihat dari sudut pandang hukum agama Islam juga mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hukum pernikahan dalam Islam adalah *sunnah*. Akan tetapi dapat perkawinan juga dapat menjadi wajib makruh, atau bahkan haram. *Sunnah* apabila orang dilihat dari jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk menikah dan dari segi material sudah mempunyai biaya hidup, maka bagi orang yang demikian itu sunnahlah baginya untuk menikah. Kalau dia nikah akan mendapat pahala sedangkan tidak nikah dia tidak berdosa dan tidak mendapat apa-apa.¹⁶

Perkawinan dapat menjadi *wajib* apabila dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah sangat mendesak untuk nikah, maka bagi orang yang seperti itu wajib baginya untuk nikah, kalau dia nikah akan mendapat pahala dan jika tidak nikah akan mendapat dosa. *Makruh* apabila orang dilihat dari

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* di Indonesia, h. 201.

¹⁵ Umar Haris Sanjayat, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 16

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 20.

jasmaniahnya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biayat untuk menikah belum ada, sehingga jika kawin akan mensengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruhlah hukumnya jika nikah, jika dia kawin tidak berdosa dan tidak dapat pahala, tetapi kalau dia tidak nikah mendapatkan pahala. *Haram* apabila seorang itu mengawini hanya bermaksud untuk menganiayat, maka haramlah untuk nikah. Demikian juga apabila seorang baik dari laki-laki atau perempuan, yang mengetahui punya penyakit atau kelemahan yang tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami/istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menderita.¹⁷

Hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksantaran perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.¹⁸ Menurut Hukum Islam, pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.¹⁹

Seiring dengan perkembangan masyarakat tujuan perkawinan tersebut juga ikut mengalami perubahan. Saat ini banyak perkawinan dilakukan dengan tujuan sebagai alat atau sarantara untuk menutupi aib atau perbuatan tercela yang dilakukan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 214.

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i (al-Fiqhu7 asy-Syafi'i al- Muyassar)*, Juz 3, Alih bahasa, Muhammad Afifi, 2017.

¹⁹ H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 1.

oleh seorang pria dan wanita. Syari'at Islam sebenarnya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, baik pria maupun wanita. Sanksi tersebut diberlakukan wajib dengan hukuman dera 100 kali, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surat an-Nur (24) ayatt 2. Selain itu pelaku zina diharamkan kawin dengan mukmin, kecuali kawin dengan kawan berzina atau orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah (QS. An-Nur ayatt : (3) sebagai berikut :

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.²⁰

Kandungan ayatt di atas menjelaskan bahwa seorang pelaku zina harus menikah dengan yang menzinainya, atau orang musyrik harus kawin dengan orang musyrik pula. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat menunjukkan sebaliknya, seorang wanita yang hamil diluar nikah dikawinkan dengan pria yang bukan kawan berzinanya hukumnya haram. Pernikahan seperti ini dilakukan karena pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab dan guna menutup aib keluarga wanita yang hamil tersebut maka dikawinkan dengan pria lainnya dengan ketentuan telah habis massa 'iddah.²¹

Maraknya kawin hamil yang dilakukan oleh masyarakat ini, kemudian menimbulkan banyak perbedaan dikalangan imam mahzab mengenai sah atau tidaknya perkawinan wanita hamil untuk dilakukan dan kedudukan anak tersebut

²⁰ Q.S An-Nur' : (3)

²¹ Abu Hamid al-ghazali, *al-Mustasyfa fi 'ilm al- Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutuba a'llmiyyah, 1983), I :286 -287.

sebagai ahli waris. Dalam memberikan pendapatnya para imam mazhab bersumber pada penafsiran mereka terhadap Al-Qur'an, sehingga menimbulkan adanya perbedaan pendapat.²²

Apabila perkawinan itu terjadi antara orang yang sedang hamil diluar nikah atau akibat perzinahan dengan kawan berzinanya, maka hal tersebut tidaklah menimbulkan permasalahan dari segi kebaikannya, dikarenakan ayat ketiga dari Surah An-Nur : (3) di atas memperbolehkannya. Disamping itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat (1), juga dijelaskan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Akan tetapi jika pernikahan terjadi antara wanita yang hamil dengan pria yang bukan menghamilinya, para ulama madzhab masih berbeda pendapat tentang kebolehan menikahnya.²³

Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidaklah menyebabkan haramnya dikawini serta wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Selain itu beliau mengatakan bahwa wanita hamil karena zina tidaklah termasuk golongan wanita yang haram dinikahi.²⁴ Sedangkan Imam Hambali berpendapat lain, yakni wanita hamil karena berzina tidak boleh dinikahi oleh laki-laki teman berzinanya

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Nala Dantara, 2007), hlm. 488.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencantara, 2006), hlm. 193.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, "fiqh al-Islamy wa Abdillatuhu". Dar al-Fikr: Damaskus. 1989, hlm.150.

maupun yang bukan menghamilinya. Kalau ingin dinikahkan maka harus menunggu masa iddah nya habis dahulu serta wanita itu harus bertobat dari perbuatan zinanya itu.²⁵

KUA Kecamatan Banguntapan Kab Bantul juga harus menghadapi realitas wanita hamil yang ingin mengesahkan pernikahannya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: "Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan wanita hamil diluar nikah perspektif maqoshid syari'ah. (Studi kasus di KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul 2018).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang kemudian berujung pada pelaksanaan penelitian sekaligus pengembangan, maka peneliti mengajukan rumursan masalah:

1. Bagaimanakah pandangan penghulu KUA Banguntapan terhadap pelaksanaan perkawinan wanita hamil diluar nikah di KUA kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta ?
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan wanita hamil diluar nikah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

²⁵ *Ibid*, hlm. 150-151.

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui pandangan penghulu KUA Kecamatan Banguntapan terhadap pelaksanaan perkawinan wanita hamil diluar nikah
- b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan wanita hamil diluar nikah

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberi sumbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di dalam bidang hukum perkawinan dan perkawinan dalam hukum islam.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pembaca dalam memahami ilmu-ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hukum Islam dan ilmu-ilmu perkawinan
- c. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca umumnya terhadap dasar hukum perkawinan dan macam perkawinan yang dilarang agama.

D.Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, sebagai cara menunjukkan keaslian dalam penelitian. Berikut ini terdapat skripsi yang dapat digunakan sebagai telaah pustaka antara lain:

Skripsi dari Aji Muhammad Sidiq pada tahun 2017 yang berjudul “*Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)*”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pelaku memiliki pandangan bahwa pernikahan nikah hamil akibat hamil pra nikah boleh dilakukan dan harus secepatnya dinikahkan karena orang tua tidak ada pilihan lain. Menyegerakan pernikahan tersebut selain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran, disamping itu juga untuk menjaga dari fitnah. Terjadinya kehamilan pra nikah salah satunya karena minimnya pengetahuan terutama di bidang agama. Karena dengan kadar keimantaran yang tinggi maka nafsu dan segala perbuatan yang dilarang agama pasti dapat dihindari, termasuk juga menghindarkan diri dari perzinahan. Sementara kehamilan yang tidak diinginkan akan berpengaruh terhadap aspek fisik, emosional dan sosial. Selain itu juga mempunyai resiko, baik terhadap ibu maupun bayinya.²⁶

Skripsi yang ditulis oleh Ishak Tri Nugroho yang berjudul “*Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tentang kawin hamil dalam Pasal 53 KHI ayat (1) memang membolehkan seseorang untuk menikahi wanita yang hamil akibat zina sesuai dengan kata “dapat” dalam Pasal 53 KHI.

Kebolehan itu didasari dengan pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan menjaga kemaslahatan bagi bayi yang dikandungnya yakni (*hifz an-nasl*) dalam rangka demi menjaga kehormatan nasab agar tidak tercampur dengan sperma pria lain, dan tentunya juga demi menjaga kelangsungan hidup anak. Tujuan ini menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dan harapannya kemaslahatan yang lainnya (*hifz ad-di n, hifz an-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-ma l*) akan mengikuti ketika *hifz an-*

²⁶ Aji Muhammad Sidiq, Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar), *Skripsi*, (Surakarta: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017), hlm. 85.

nasl ini terjaga. Meskipun makna “dapat” dalam ayatt (1) juga mengandung pemahaman boleh untuk memilih kawin tanpa ada keharusan baik dengan yang menghamili ataupun bukan, tapi idealnya yang mengawini adalah pria yang menghamili daripada kebolehan kawin dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, yang hanya bertujuan menyelematkan harga diri si wanita dan anaknya dari fitnah yang berkelanjutan.²⁷

Skripsi yang disusun oleh Risma Fatika Putri pada tahun 2017 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “1. wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayatt (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, 3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kemudian menurut beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Kecapi ada beberapa faktor terjadinya perkawinan wanita hami di luar nikah yakni *Pertama*, kadar keimantaran para pelaku rendah, *Kedua*, pergaulan bebas, *Ketiga*, tidak mendapatkan restu dari orang

²⁷ Ishak Tri Nugroho, Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan *Maqashid Syari'ah*), *Skripsi* (Yogyakarta: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), hlm. ii.

tua, *Keempat*, kurang adanya hukuman bagi para pelaku perzinaan, *Kelima*, kurang adanya penyuluhan dari KUA setempat.²⁸

Skripsi yang disusun oleh Afif Azhari pada tahun 2009 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”. Hasil studi menyimpulkan bahwa proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Cerme sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. Akan tetapi, KUA Cerme memberikan persyaratan khusus yaitu pembuatan pernyataan kebenaran yang ditulis di atas materai 6.000 yang dilakukan oleh kedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup. Dalam melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara membuat surat pernyataan kebenaran yang di tulis di atas kertas bermaterai 6000 yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumhur ulama’ yang membolehkan dinikahnya seorang wanita yang dalam keadaan hamil oleh laki-laki yang menghamilinya. Selain itu ikhtiyar dan ikhtiyat kepala KUA ini dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan, karena KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang sesuai dengan Pasal 53 Ayatt 1 Kompilasi Hukum Islam.²⁹

²⁸ Risma Fatika Putri, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan), *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), hlm. iii.

²⁹ Afif Azhari. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, 2009), hlm. iv.

Dari beberapa penelitian di atas terlihat beberapa kedekatan judul penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi dan waktu penelitian.

E.Kerangka Teoritik

Indonesia merupakan negara yang memiliki ideologi Pancasila di mana agama memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini terlihat dari ditematkannya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pertama dalam Pancasila. Di Indonesia perkawinan dianggap memiliki hubungan yang erat dengan agama. Perkawinan bukanlah mengandung unsur lahir tapi juga mengandung unsur batin.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mana menimbulkan suatu hubungan yang diatur oleh hukum, perkawinan perlu diatur oleh hukum untuk melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri dan menegaskan antara hak dan kewajiban, dan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan serta perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh dilakukan.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita, mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, adalah :³⁰

³⁰ Mohamad Daud Ali, *hukum Islam*, (Jakarta, Rajawali Pers 2001), hlm. 6.

1. Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon-suami istri, tetapi juga antara kedua orang tua belah pihak.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
3. Asas kebebasan memilih pasangan, juga di sebutaka dalam sunnah Nabi.
4. Asas kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat, asal, bawaan). Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal lain berbeda.
5. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.
6. Asas monogami terbuka, disimpulkan dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayatt 3 jo ayatt 129, di dalam ayatt 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istri-istrinya. Dalam ayatt 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidak mungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu

maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja³¹

Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradat dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu pengenalan antar suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.³²

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³³

Menurut Saleh al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.³⁴

Pernikahan merupakan sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan

³¹ *Ibid*, h. 11

³² *Ibid*, h. 15

³³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

³⁴ M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), hlm. 1.

wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³⁵

Pengertian perkawinan, baik menurut hukum islam ataupun undang-undang perkawinan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan.³⁶ Masalah perkawinan bukan hanya masalah materi saja, akan tetapi dituntut adanya kesiapan dari diri masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam perkawinan bukan hanya sekedar saling mengerti tetapi harus bisa menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan.

Dijelaskan lagi dalam para pakar Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain menurut:

1. Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.³⁷

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 9.

³⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 108.

³⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet ke v, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 47.

2. Menurut Hazairin bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seks.³⁸
3. Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual.³⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang undang Perkawinan) memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Definisi perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu : “Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁴⁰ Definisi perkawinan menurut Subekti yaitu : “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.⁴¹

³⁸ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1961, hlm. 61.

³⁹ Ibrahim Hosen, *Figh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Ihya Ulumurdi, Jakarta, 1971, hlm. 65.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1966, hlm. 7.

⁴¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 11.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut : Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. *mitsaaqan gholiidhantarartinya* perjanjian yang sangat suci dan kuat.

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴² Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Menurut Asaf A. A fzyee, tujuan perkawinan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu⁴³ :

1. Aspek Agama (ibadah)

- a. Perkawinan merupakan pertalian yang teguh antar suami istri dan turunan; pertalian yang erat dalam hidup dan kehidupan merupakan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang bermutu tinggi dalam memperkembangkanbiakan manusia sebagai karunia Tuhan”.

⁴² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm. 13

⁴³ Chuzaimah Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hl., 57.

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rezeki dari yang baik-baik”. (Q.S. AnNahl(16):71)

- b. Perkawinan merupakan salah satu Sunnah Nabi dan mereka dijadikan tauladan dalam kehidupan.

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan...” (Q.S. Ar-Ra’du (13):38)

- c. Perkawinan mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan.

“Dan kawinlah orang-orang yang bersendirian di antara kamu dan orang-orang yang layatk (berkawin) dan hamba-hamba sahayatmu yang lelaki dan hamba-hamba sahayatmu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi maha mengetahui.” (Q.S. An-Nur(24)32)

- d. Istri merupakan simpantaran yang paling baik. H. R Turmudzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Tsauban, Tsauban berkata ketika turun (Q.S. Ath-Tauban(9):34)

“Ketika itu kami bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan, lalu sebagian sahabat ada yang berkata : Telah ada ayat yang turun tentang emas dan perak. Andai kata kami tahu ada yang lain yang lebih baik, tentu akan kami simpan. Nabi menjawab : Lisan yang selalu berdzikir, hati yang menunjang suaminya”

2.Aspek Hukum

Perkawinan sebagai adat, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami-isteri untuk membina rumah tangga bahagia. Sebagai ikatan dan perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan janji yang dibuatnya. Karena itu, dengan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Sebagai unit kecil dari masyarakat, juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan anak dengan orang tuanya sebagai ikatan luhur dan kuat.

Berdasarkan sudut pandang kebudayaan masyarakat, maka suatu perkawinan merupakan pengatur prikelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksuil (antar lain), yakni keteraturan dari kehidupan seksuil tersebut. Perkawinan, antara lain menyebabkan bahwa di dalam pengertian masyarakat, seorang pria dan seorang wanita tidak boleh secara sembarangan melakukan hubungan seksuil.⁴⁴

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya, dan setelah pernikahan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 16

besarkan lagi permasalahannya.⁴⁵ Terjadinya wanita yang hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain daripada adanya sebuah pergaulan bebas, namun juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam serta kesadaran hukum sangat diperlukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan wanita hamil ini diatur pada pasal 53, yang berbunyi :⁴⁶ Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nur : ayatt (24) 3:

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك
على المؤمنين.⁴⁷

Dari ayatt di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki

⁴⁵ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 201.

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 125.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Nala Dantara, 2007), hlm. 488.

baikbaik untuk mengawini mereka (Al-Baqarah: 221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayatt (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. **h}urrima z|a>lika ‘ala> al-mu’mini>n**. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahnya.⁴⁸

Pernikahan wanita hamil di luar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum Islam, diantaranya : ⁴⁹

- a. Sah atau tidaknya akad pernikahan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam.
- b .Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layatnya suami istri.
- c.Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan.

Para ulama’ sepakat bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah *sah*. Hal ini berdasarkan firman Allah Pada Surat An-Nisa : 3

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 165.

⁴⁹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 36-37.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.⁵⁰

Namun para ulama' berbeda pendapat tentang diperbolehkannya pasangan pengantin tersebut bercampur sebelum anak yang dikandung lahir. Di antara pendapat para ulama' adalah sebagai berikut :⁵¹

- a. Ulama' mazhab yang empat (Hantarafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa pernikahan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
- b. Ibnu Hazm (Zahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman *dera* (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini didasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat nabi, antara lain :
 - 1) Ketika Jabi bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah zina, beliau berkata : “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
 - 2) Seseorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar: “Ya amirul mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan”. Ketika itu khalifah memerintahkan

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Nala Dantara, 2007), hlm. 488.

⁵¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencantara Media Group, 2006), hlm. 124-125.

kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman *dera* (cambuk) kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama, diantaranya :⁵²

- a. Imam Muhammad bin Al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa pernikahannya itu sah, tetapi *haram* baginya bercampur selama bayi yang di kandungannya belum lahir.
- b. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahannya itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan pernikahan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin *nasab* (keturunan) bayi yang dikandungnya itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).
- c. Sedangkan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul dimantara pernikahan wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak sah akad nikahnya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan, berdasarkan sabda nabi:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستقي ماءه زرع غيره (رواه ابو داود)⁵³

Dengan demikian status anak itu adalah sebagai anak zina. Bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya.⁵⁴ Mengenai bayi yang

⁵² *Ibid*, hlm. 136.

⁵³ Hadis Kutub as-Sittah, Sunan Abu Dawud, *Kitab Nikah, Bab: Menyetubuhi Tawantaran Wanita*, Hadis ke 1844.

lahir dari wanita yang hamil di luar nikah, ulama' fiqh sepakat menetapkan bahwa status anak itu termasuk anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi bila yang mengawini itu termasuk orang yang menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat di kalangan ulama' fiqh, yaitu :⁵⁵

- a. Ada yang menetapkan bahwa bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulan ke atas, dan bila kurang dari umur kandungan tersebut, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak suaminya yang sah.
- b. Ada lagi yang menetapkan bahwa bila ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah, karena keberadaannya dalam kandungan, mendahului pernikahan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah pelaksantaran nikah hamil dalam masyarakat Banguntapan.

⁵⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencantara Media Group, 2006), hlm. 124-127.

⁵⁵ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Saat Ini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 40.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif - antaralitis* yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian mengantaralisisnya secara cermat dan teliti.⁵⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian secara *normatif*. Pendekatan *normatif*, yaitu menggunakan tolak ukur agama, baik itu bersumber dari nash (al-Qur'an dan al-Hadis) maupun juga kaidah fiqh dan ushul fiqh, dengan penjelasan pendapat para ulama fiqh Imam Madzhab yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu hamil pra nikah itu baik atau buruk, boleh atau tidak boleh.⁵⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Ada beberapa alasan pengamatan dijadikan sebagai cara utama pengumpulan data, yaitu: (1) didasarkan atas pengamatan sendiri. (2) memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi sebenarnya. (3) bisa menghindari kekeliruan dan bias karena kurang mampu mengingat data hasil wawancara. (4) memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. (5) dalam kondisi tertentu diantara teknik lain tidak memungkinkan, pengamatan dapat

⁵⁶ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 20.

⁵⁷ *Ibid*, h. 30

menjadi alat yang sangat bermanfaat.⁵⁸ Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan pengamatan langsung terhadap obyek atau materi yang diteliti dan diselidiki, seperti: pelaksantaran nikah hamil di KUA, kondisi wilayah Kecamatan Banguntapan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksantaran nikah hamil.

b. Wawancara

Data yang dikumpulkan melalui wawancara umumnya adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab. Oleh karena menulis hasil wawancara memiliki banyak kelemahan, dan akan sangat sulit menulis sambil melakukan wawancara serta sulit membedakan antara data deskriptif dan antara data yang tafsiran, maka selama wawancara peneliti sampel untuk penelitian.⁵⁹ Penyusun akan mewawancarai tiga orang penghulu yaitu kepala KUA Banguntapan yang merangkap sebagai penghulu dan dua orang penghulu lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.⁶⁰ Penyusun mengambil catatan-catatan yang berupa buku induk pencatatan perkawinan, buku kelahiran anak, monografi desa, serta buku-buku referensi yang mendukung skripsi.

⁵⁸ *Ibid*, h. 62

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 63.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hlm.206.

5. Analisa Data

Antaralisis data dilakukan secara kualitatif, artinya antaralisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.⁶¹ Cara berfikir deskriptif mengantaralisa subyek permasalahan pernikahan dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat konkrit kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan untuk mempermudah dalam pemahaman dan penyusunan skripsi, sistematika pembahasan dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab yang dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang dikaji, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dihadirkan lebih dahulu untuk mengetahui secara detail signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalahnya, sejauh mantera penelitian dan pendekatan atau teori apa yang digunakan.

Bab kedua, Bab ini menguraikan tentang perkawinan hamil diluar nikah dan dispensasi kawin serta maqashid syariah yang mejadi kajiannya meliputi :

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99.

konsep perkawinan, gambaran umum tentang perkawinan, gambaran tentang dispensasi kawin dan gambaran tentang konsep maqashid syariah.

Bab ketiga, menggambarkan secara umum tentang KUA Kecamatan Banguntapan Bantul secara jelas kemudian menggambarkan data pelaksanaan perkawinan yang berada di KUA Kecamatan Banguntapan. Data-data yang berhubungan dengan nikah hamil di Kecamatan Banguntapan, pemberian dispensasi perkawinan, dan hasil wawancara dengan kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta dalam bab ini juga dipaparkan misi, visi serta motto KUA Kecamatan Banguntapan dan juga disampaikan janji atau maklumat pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta.

Bab keempat, analisa terhadap permasalahan yang dijadikan fokus penelitian yaitu bagaimanakah pandangan penghulu terhadap nikah hamil ,bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang nikah hamil di KUA Banguntapan, bagaimanakah ketetapan hukum pernikahan wanita hamil akibat zina menurut hukum islam.

Bab kelima, merupakan akhir penelitian ini sekaligus merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan penghulu di KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil adalah diperbolehkan dengan syarat pernikahan tersebut dilaksanakan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pandangan tersebut menyandarkan argumentasi pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, yaitu seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jika dinikahkan dengan pria yang bukan menghamili maka tidak diperbolehkan. Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili, tidak ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut, selain itu juga untuk menjaga kemurnian nasab. Alasan dilaksanakannya nikah hamil di KUA Kecamatan Banguntapan adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga dan anak yang dikandung.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah hamil adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 53 KHI dan tidak bertentangan dengan kandungan surat An-Nūr (24) ayat 3. Wanita hamil akibat zina boleh dinikahkan dengan pria yang menghamili demi kemaslahatan, yaitu menjaga aib keluarga, agar anak yang dikandung memiliki nasab yang jelas. Apabila

wanita hamil akibat zina akan dinikahkan dengan pria yang bukan menghamili, maka PPN KUA Kecamatan Banguntapan akan menimbang-nimbang kembali, dan tindakan yang tepat adalah tidak menikahkan wanita hamil tersebut, karena mengacu pada aturan KHI dan agar supaya tidak terjadi percampuran nasab.

B. Saran-Saran

1. Pejabat pencatat nikah diharapkan dapat melakukan pendekatan dan upaya yang bermanfaat agar dapat mengantisipasi terjadinya pernikahan wanita hamil diluar nikah.
2. Masyarakat diharapkan dapat menjadi kontrol bagi pergaulan bebas generasi muda yang mengarah kepada kebebasan seksual sehingga dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah.
3. Pemerintah diharapkan dapat meninjau kembali keberadaan Pasal 53 KHI ditinjau kembali, karena pasal tersebut dapat memicu masyarakat terutama bagi mereka yang kurang mendalami keagamaan untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Karena kehamilan diluar nikah tidak menghalangi mereka untuk tetap melangsungkan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Abdurrahman, Abu Abdullah bin Muhammad ibn, *Tafsir Ibn Katsir*, Jakarta:

Pustaka Imam As-Syafi'i, 2009.

Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Nala Dana, 2007.

Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al – Qur'an, 1989.

Universitas Islam Indonesia, *Al – Qur'an dan Tafsirnya*, Jogjakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1990.

B. Kelompok Hadist

Bukhori Muslim, Hadist Kutubut Tis'ah, bab hukum hudud pezina. Hadist ke. 6318.

Bukhori, Al-Imam Al-Hafid Abi 'Abdillah Muhammad bin ismail bin Ibrahim bin al – Mughirah, *Shahih Al – Bukhori: Al jami' al musnad as-shahih*, Riyad: Batul al-afkar ad-Dailiyati an Nasyir, 1998.

Bukhori, Al-Imam Al-Hafid Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-mughirah, *Kitab Mawaqid As – Salah Al khamsi Kaffarat*. No.528.

Darimi, Sunan ad-, *Hadist Muhammad ad-Darimi*, Beirut: Dar al Fikr, 2005.

Daud, Sunan Abu, *Hadist Kutub As-Sitta*, Kitab Nikah, Hadis ke 1844

Sunan An-Nasai hadist Kutubut Tis'ah Kitab At-Thalaq, Hadist 3410.

C. Kelompok Fikih dan Ushul Fiqh

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Inchtiar Baru Van Hoeve, 1980

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: AkademiaPressino, 2004

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Uli Press, 1980

Ahmad Mudjab Maali, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002

Ahmad Ratsuni, *Nazariyyatal-maqashidal-syari'ah 'indaal-Imam al-Syatibi*, Riyad: International Islamic Publisinghouse, 1995

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press.2001

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencantara, 2006

Athibi Jawad, *Fikih Lima Madzhab*, alih bahasa masku dkk, Jakarta: Linea, 2007.

Darojat Zakiyah, dkk, *Ilmu Fiqh: Dantara bhakti wakaf*, 1995

Azhari. Afif, *Tinjauan hukum Islam terhadap wanita hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhiyyah. 2009.

ChuzaimahYanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

- Dadan Muttaqin, dkk. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Uli Press, 1999
- Efendi, M. Zein, Saria, ushul fiqh, Jakarta: Gramedia, 2004
- Fuad Moch Fachruddin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jayat, 1991
- Ghazaly, Abu Hamid, Al mustasyfafi 'ilmial-ushul, Beirut: Dar al kutubu al- 'ilmiyah, 1983.
- Ghazaly, Abdurrahman Fiqih Munaqahat, Jakarta: Kencantara Prenada Group. 2003
- H. Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Hallaq, Wael B. Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk ushul fiqh madzhab sunni alih, bahasa E. Kusnadiningrat, dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta (PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan, M. Ali Masail Fiqhiyyah Al-Hadisah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, Jakarta: UI Press, 1990
- Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: Tintamas, 1961
- Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Hosen, Ibrahim, Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan rujuk, Jakarta: Ihya Ulumurdi, 1971.

Ibnu Taimiyah, Hukum-Hukum Perkawinan, Alih Bahasa Rusnan Yahya, Jakarta:

Pustaka Al – Kautsar, 1977

Ishak Tri Nugroho, Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan

MaqashidSyari'ah), Skripsi, Yogyakarta: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,

2014

Jaziri, Abd Ar-Rahman Kitab Al-Fiqh, Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-kubra,

1969.

Kamal Mukhar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan

Bintang,1993

Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara

Muslim Kontemporer, Yogyakarta: Academia TAZZAFA, 2004

Kresna, 2016, Dalam setahun, 976 pelajar Yogyakarta hamil di luar nikah, diakses

dari [https://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-setahun-976-pelajar-](https://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-setahun-976-pelajar-yogyakarta-hamil-di-luar-nikah.html)

yogyakarta-hamil-di-luar-nikah.html pada tanggal 30 Agustus 2018.

M QuraishShihab, Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah

Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, Jakarta:

Lentera Hati, 2005

M. Sholeh Al-Utsaimin, Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah

Tangga, Surabaya: Risalah Gusti, 1991

M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama,

Jakarta:Sinar Grafika,2005

M. Zein Sa ria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta : Gramedia, 2004

- M.Ansahry. Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-Masalah Krusial ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Mahjuddin, Masailul Fiqhiyyah, Jakarta: Kalam mulia 2003.
- Mohammad Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, Jakarta: Gema Insani
Press,2002
- Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, ter.
Yudian W. Asmin .MA., Surabaya : Penerbit Al-Ikhlash, 1995
- Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, Dawabith Maslahat fi as-Syari'ahal-
Islamiyah, Damaskus: Muassasah-Risalah, 1997
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1996
- Musthafa Luthfi, Nikah Sirri, Jarakarta: WacantaralmiahPress, 2010
- Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Putri, Risma Fatika, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh
Masyarakat Tentang Perkawinan, akibat perzinaan wanita hamil diluar
nikah (Studi kasus di Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda Lampung
Selatan), Skripsi, Lampung: fakutas syari'ah Institut Agama Islam Negeri
Raden Intan, 2017.
- Qardhawi, Yussuf: al, fiqhimaqashid syari'ah, alih bahasa Babul Fikri, Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Sabbiq, Sayyid, Fiqhussunnah, alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung: PT Al-
Ma'arif, 1980.

- Sahari Tihami dan Sahrani, *Fiqih Munaqahat kajian fiqih lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Siddiq, Aji Muhammad, *Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa karangmojo Kecamatan Tasik Madu Kabupaten Karanganyar*, Skripsi, Surakarta Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017.
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- SoerjonoSoekanto, *Intisari Hukum Keluarga, Alumni*, Bandung, 1980
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Syatibi, Abu Ishak, *al muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*. Jilid II, Mesir: Dar al Ma'arif. t.t.
- Syatibi, Ibrahim bin Musa Al-Ghirnati, *Al-Muwaqati fi ushul As Sayri'ah*, Mesir: Dar al ma'arif, t.t
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bmbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Umar Haris Sanjayat, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017

Umar hasbi, Nalar Fikih Kontemporer, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

WirjonoProdjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1966

Yudian W Asmin, Maqashidal-Syari'ah sebagai Doktrin dan metode, Jurnal Al-Ahwal, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 1995

Yussuf, Muhammad dkk, Fiqih dan Ushul Fiqih, Yogyakarta: Polgi akademika UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Maqashid Syari'ah, alih bahasa Babul Fikri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007

Zakiyat Darajat, dkk, Ilmu Fiqh, Jakarta: Dantara Bakti Waqaf, 1995

Zuhailywahaby, Fiqih Imam Syfi'i (al fiqih as syafi 'i al muyassar) , juz 3, alih bahasa Muhammad Afifi, 2017.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Syukron Alan Nasrullah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat & Tanggal Lahir : Sleman, 24 September 1993
Agama : Islam
Alamat : Popongan Baru, Sinduadi, Mlati, Sleman
RT:16/RW:30. B.28
E-mail : Alansyukron@363gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

- 1999 –2005 SD Sinduadi 1
- 2005 –2008 MTs N Yogyakarta 1
- 2008– 2011 MAN Yogyakarta 3.

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyusun,

Muhammad Syukron Alan Nasrullah